

BAPPEDA

MUNA BARAT

RENSTRA

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2017-2022



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) mengamanahkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pada setiap OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, OPD pun juga diberikan amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format jangka menengah (5 tahun).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi dasar kontrak kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Kepada Bupati Kabupaten Muna Barat yang harus dilaksanakan.

Akhirnya, atas kerja dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran, kami menyampaikan terima kasih. Dokumen Renstra ini akan mejadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda kedepannya. Amin

Laworo,

2017

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MUNA BARAT,**

RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
NIP. 19660804 199003 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud	4
1.3.2. Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Muna Barat	6
2.2. Sumber Daya Bappeda Kab. Muna Barat	8
2.2.1. Kepegawaian	8
2.2.2. Sarana Prasarana	9
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	15
2.4.1. Tantangan	16
2.4.2. Peluang	17
BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	19
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	38

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
.....	
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	40
.....	
BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN	43
.....	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Muna Barat	43
.....	
BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
.....	
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
.....	
6.1. Non Urusan	48
.....	
6.2. Urusan	48
BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	63
.....	
BAB. VIII. PENUTUP	70
.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 2.1. Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Bappeda Muna Barat

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Bappeda Kabupaten Muna Barat 2011-2015

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Muna Barat

Tabel 7.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD

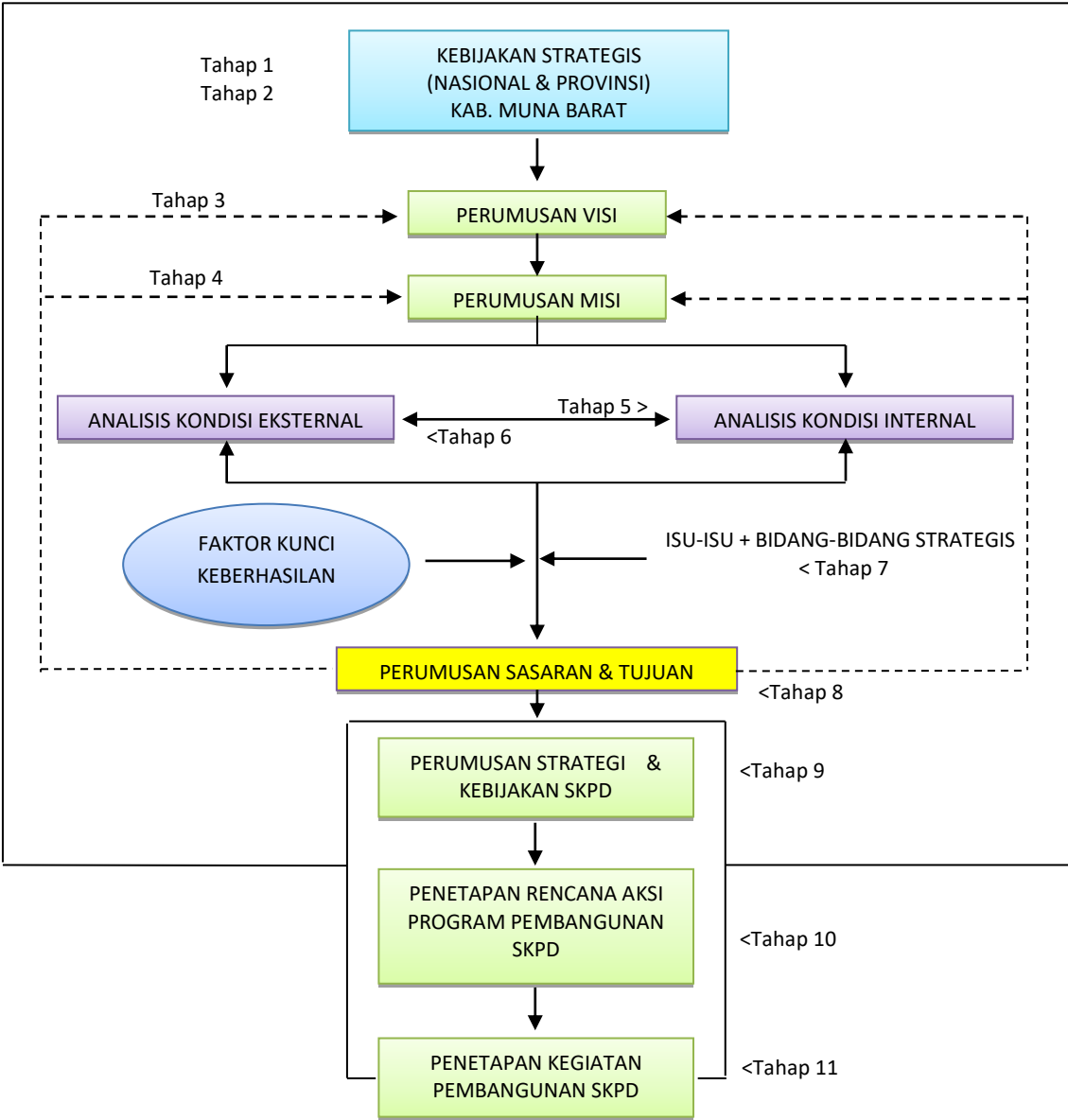
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Muna Barat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Langkah-langkah penyusunan Renstra SKPD dapat ditinjau dari aspek substansi isi dokumen rencana dan operasionalisasi kegiatan penyusunan. Berdasarkan aspek substansi isi dokumen, proses penyusunan sebagaimana digambarkan dalam bentuk diagram alir pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KAB. MUNA BARAT



Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat 2017-2022, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 18. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
 19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Bappeda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Muna Barat dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 – 2022. Selain itu Renstra Bappeda disusun sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Muna Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Muna Barat Tahun 2017-2022 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1.	Latar Belakang
	1.2.	Landasan Hukum
	1.3.	Maksud dan Tujuan
	1.4.	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Muna Barat
	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VIII	PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan lembaga teknis daerah, yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah mengacu pada landasan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Berpijak dari kebijakan daerah tersebut, kedudukan Bappeda Kabupaten Muna Barat adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Muna Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan

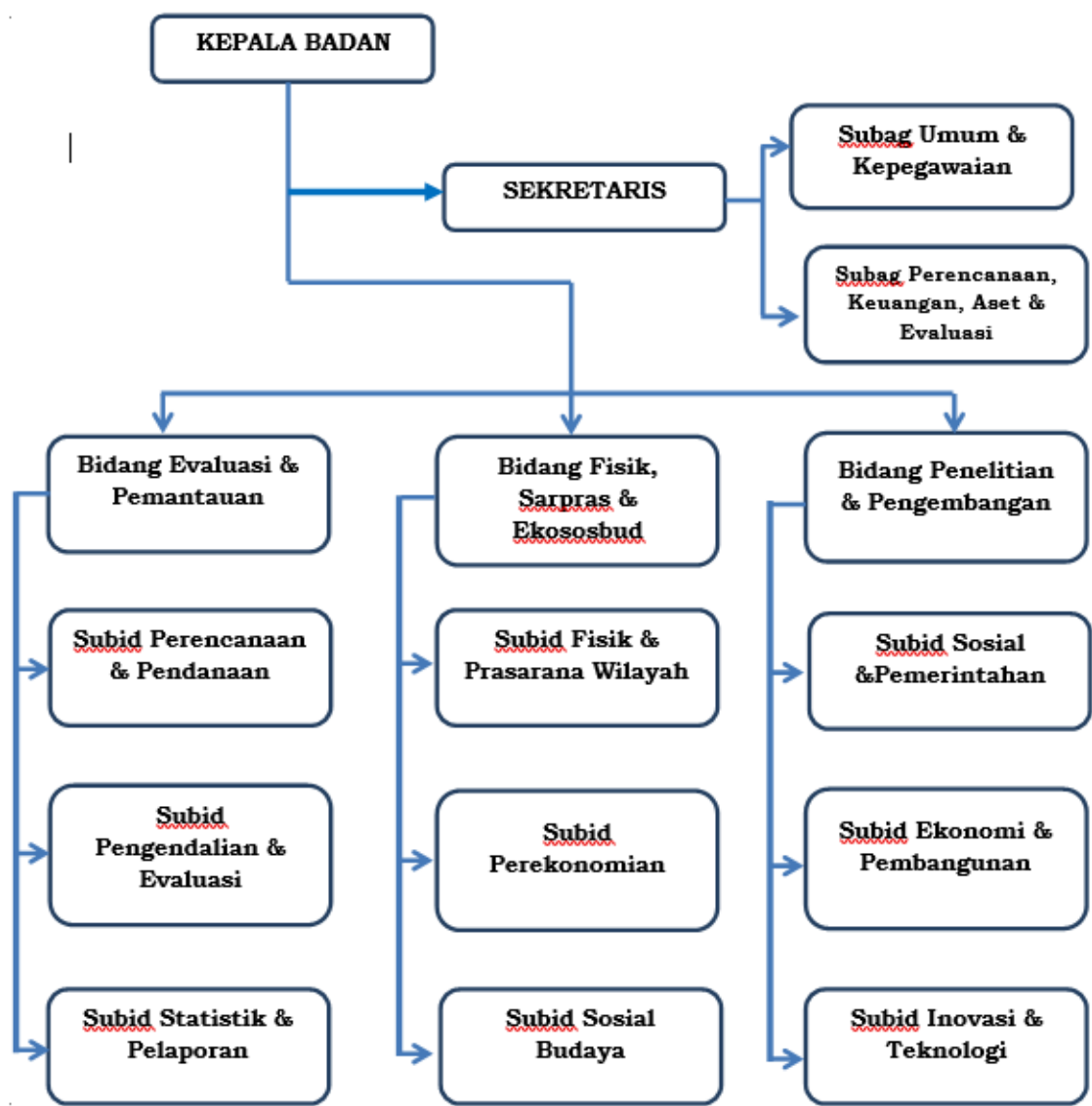
dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*actionplan*). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II.b sesuai dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, & Evaluasi
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Evaluasi dan Pemantauan terdiri dari :
 - Subid Perencanaan dan Pendanaan
 - Subid Pengendalian dan Evaluasi
 - Subid Data Statistik & Pelaporan
4. Bidang Fisik, Sarana Prasarana, Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - Subid Fisik dan Prasarana Wilayah
 - Subid Perekenomian
 - Subid Sosial Budaya
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - Subid Sosial dan Pemerintahan.
 - Subid Ekonomi dan Pembangunan
 - Subid Inovasi dan Teknologi

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Muna Barat



Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat

2.2.1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan pegawai di Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sampai dengan bulan Januari 2018, jumlah personil yang ada di Bappeda Kabupaten Muna Barat adalah 22 Orang, pegawai dengan status PNS berjumlah 11 orang, dan pegawai dengan status PTT berjumlah 11 orang.

Tabel 2.1. Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai		
	L	P	Total
Sekola Dasar (SD)	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
Sekolah Menengah Umum (SMU)	3	-	3
Diploma III	-	-	-
Diploma IV	-	-	-
Sarjana – Strata 1	3	1	4
Sarjana – Strata 2	4	-	4
Sarjana – Strata 3	-	-	-

Tabel 2.2. Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Pangkat/Golongan	Ruang / Jumlah (orang)					
	A	B	C	D	E	Total
Golongan I	-	-	-	-	-	-
Golongan II			2			2
Golongan III	-	2	2	2	-	6
Golongan IV	2	1	-	-	-	3
Total/Golongan	2	3	4	2	-	11

Berdasarkan uraian diatas, tingkat pendidikan pegawai di Bappeda Kabupaten Muna Barat relatif sudah tinggi dan latar belakang pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan. Guna menghadapi tantangan kedepan, Bappeda Kabupaten Muna Barat terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan ketrampilan para pegawai serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme khususnya bidang Perencanaan Pembangunan melalui Pendidikan, kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai.

2.2.2. Sarana Prasarana

Kondisi lain yang patut dicermati dan ditindaklanjuti adalah mengenai daya dukung sarana penunjang operasional pemerintahan, khususnya perangkat komputer/laptop. Sarana ini penting mengingat kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan,

perencanaan, dan pengendalian sangat membutuhkan dukungan perangkat komputer, baik yang bersifat *hardware* maupun *software*. Di samping itu, terdapat pula harapan untuk mengembangkan sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan berbagai Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Muna Barat di masa mendatang.

Sementara itu fasilitas lainnya yang tak kalah pentingnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas adalah ketersediaan kendaraan operasional. Pada tahun 2018 kendaraan operasional dinas yang ada di Bappeda Kabupaten Muna Barat adalah : Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 unit, Kendaraan Roda 2 sebanyak 11 unit. Kondisi kendaraan operasional di Bappeda Kabupaten Muna Barat berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula kendaraan operasional yang kurang baik kondisinya terutama untuk kendaraan roda 2. Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana dan sarana di Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya semakin berkurang. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat, maka dibutuhkan beberapa perbaikan dan penambahan pada beberapa fasilitas tertentu.

Data sarana dan prasarana di lingkungan Bappeda Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Sarana dan Prasaran Bappeda Muna Barat

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung	1 unit	luas 694,50 m2
2.	Komputer	2 Unit	
3.	Laptop	10 Unit	
4.	LCD Proyektor	2 Unit	
5.	Mesin Ketik	4 Unit	
6.	Televisi	1 Unit	
7.	Sound System	1 Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai daerah pemekaran yang terbentuk di tahun 2014, evaluasi kinerja Kabupaten Muna Barat dapat dinilai pada periode 2014-2016. Perda RKPD Kabupaten Muna Barat sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 telah ada, sesuai dengan mulai terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat. Namun Perda RPJP dan Perda RPJMD belum ada sebab Bupati Definitif baru terpilih pada tahun 2017. Kondisi pembangunan di wilayah Muna Barat sebelum menjadi Daerah Otonomi Baru memiliki tingkat kesenjangan pembangunan yang lebih tertinggal dibanding dengan pembangunan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara,

sementara tingkat kehidupan masyarakat Kabupaten Muna Barat relatif stagnan. Berbagai permasalahan pokok yang ada di awal periode pemerintahan DOB Muna Barat mulai perlahan diselesaikan dengan meletakkan dasar pondasi Pembangunan yang kuat, melalui penataan ruang dan pengembangan wilayah yang diprioritaskan pada pembukaan akses daerah-daerah potensial, pembukaan akses rencana pusat-pusat kegiatan publik, dan pengembangan akses keluar masuk wilayah Kabupaten Muna Barat dengan wilayah Kabupaten lainnya.

Hasil pembangunan di awal Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu tahun 2014-2016 sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Defenitif, membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, Hal ini ditunjukan dengan adanya perkembangan pembangunan yang signifikan khususnya pada bidang infrastruktur Jalan. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan pembangunan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Muna Barat yang lebih baik lagi.

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat pada periode renstra sebelumnya (2014–2016). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukan capaian kinerja Bappeda selama periode 2014– 2016.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat

No.	Indokator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD TahunKe-					Realisasi Renstra OPD TahunKe-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	RPJPD	1					1				
		RPJMD	1					1				
		RKPD	1	1	1	1	1	1	1			
		Renstra						1				
		Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ)	1	1	1	1	1	1	1			
		LPPD OPD	1	1	1	1	1	1	1			
		LAKIP OPD	1	1	1	1	1	1	1			

		Monev dan Pelaporan	4	4	4	4	4	4	4			
2.	Perencanaan Tata Ruang	RTRW Kab. Muna Barat	1						1			
		RDTR Kecamatan	4	4	4	3	3	4	4			
3.	Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	PDRB	1	1	1	1	1	1	1			
		IPM	1	1	1	1	1	1	1			
		Data Potensi Kabupaten Muna Barat	1	1	1	1	1	1	1			

Dari Tabel 2.4 tersebut diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Muna Barat telah berusaha untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Muna Barat. Hal ini ditandai dengan kinerja perencanaan pada Bappeda sudah sesuai antara target dan realisasi.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Bappeda Kabupaten Muna Barat 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya prasarana, sarana dan fasilitas perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	a. Meningkatnya kinerja pelaksanaan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	b. Meningkatnya Disiplin Aparatur	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	c. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	d. Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	e. Meningkatnya Kapasitas Perencanaan.	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	f. Meningkatnya data /informasi/ statistik pembangunan daerah yang akurat dan up to date.	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	a. Tersedianya Dokumen RPJPD	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya Dokumen RPJMD	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	c. Tersedianya Dokumen RKPD	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
4	Terjalannya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders.	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	a. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	b. Terselenggaranya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	c. Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Ekonomi.	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	d. Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi.	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	e. Terselenggaranya Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	f. Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur.	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	g. Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat sebagai pelaksana Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai perencana tingkat Daerah Istimewa Kabupaten Muna Barat serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Perencana di Tingkat Nasional (Bappenas).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara

dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Muna Barat yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan) masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

2. Adanya data/informasi yang tidak akurat dan peraturan perundangan yang selalu berubah.

Tantangan pengembangan pelayanan Bappeda ke depan adalah Sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan belum terkelola dengan baik, sehingga data/informasi dan sumber data masih beragam. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran. Tantangan selanjutnya yang cukup signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah adalah munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.

3. Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.

pembinaan disiplin kerja khususnya terhadap perencana daerah menjadi mutlak dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kerja dan peningkatan kemampuan dan pengetahuan perencana tentang system perencanaan.

4. Komitmen perencanaan dengan OPD.

Komitmen ini penting untuk mewujudkan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang ada di setiap OPD. Upaya ini untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemkab

5. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Tantangan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat.

2.4.2. Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di daerah termasuk di dalamnya Kabupaten Muna Barat, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan global, baik dari skala nasional maupun internasional.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Muna Barat.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Muna Barat.
2. Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD.
3. Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
4. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
7. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
8. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
9. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
10. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Muna Barat saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam RPJMD Muna Barat tahun 2017-2022, terdapat 29 isu strategis yang hendak direspon menjadi sasaran prioritas dalam pembangunan 5 tahun kedepan. Bappeda Muna Barat sebagai institusi perencanaan daerah, ingin menempatkan diri sebagai institusi vital dalam menyelesaikan isu-isu strategis pembangunan tersebut yang selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh OPD perangkat daerah Kabupaten Muna Barat.

Permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Muna Barat, diantaranya adalah:

- 1) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar wilayah (Transportasi, listrik, dan air bersih,) baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap daya dukung untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Muna Barat.
- 2) Cakupan daerah rawan bencana banjir cukup luas yang berdampak besar terhadap kerugian masyarakat dan kerusakan infrastruktur jalan.

- 3) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 4) Masih relative tingginya Angka kemiskinan
- 5) Daya saing produk unggulan Kabupaten Muna Barat secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan tersebut.
- 6) Terbatasnya akses masyarakat ke sumber permodalan, penguasaan iptek dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan pengairan dan jaringan jalan pada sentra-sentra produksi.
- 7) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi dan budaya kerja/etos kerja.
- 8) Belum tersedianya Prasarana Pemerintahan Daerah yang representatif dalam upaya menunjang pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Salah satu isu strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan harga konstan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat selama tahun 2014 dan tahun 2015 cukup baik yakni mengalami peningkatan 7.66% dan 8.14% secara berturut-turut. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yakni sebesar 7%. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat tersebut masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Tenggara yakni mencapai 8,42%. Demikian pula PDRB perkapita yang menjadi salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu daerah, yaitu dengan melihat besarnya pendapatan perkapita dari daerah yang bersangkutan. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Muna Barat berada dibawah pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna Barat masih berada dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. Pada tahun 2013 PDRB perkapita Kabupaten Muna Barat sebesar Rp. 18,42 Juta, Pada tahun 2014 sebesar Rp. 20,23 Juta, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 22.6 Juta per kapita per tahun. Pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2014 sebesar 9.83% dan pada tahun 2015 meningkat 11,78%.

Secara umum jumlah maupun persentase penduduk miskin Muna Barat mengalami peningkatan dari tahun 2014. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin diperkirakan 11 ribu jiwa atau 14,46 persen, sedangkan di tahun 2015 jumlah

penduduk miskin menjadi 11,8 ribu jiwa atau 15,45 persen. Hal ini ditengarai merupakan pengaruh dari kenaikan harga BBM yang secara langsung meningkatkan harga barang jasa kebutuhan masyarakat sehingga menurunkan daya beli masyarakat termasuk yang miskin. Disamping itu, menurut kab/kota persentase penduduk miskin di Kabupaten Muna Barat berada pada urutan ke 7 dari 12 kabupaten/kota Se Sulawesi Tenggara yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Muna Barat relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara.

Angka garis kemiskinan Kabupaten Muna Barat tahun 2014 sebesar Rp. 253.795,- per kapita per bulan, meningkat menjadi Rp. 269.838,- per kapita per bulan atau meningkat sebesar 6,32 persen pada tahun 2015. Artinya bahwa penduduk dengan pengeluaran perkapita antara Rp. 253.795 dan Rp. 269.838,- yang tidak termasuk kategori miskin pada tahun 2014 menjadi kategori miskin pada tahun 2015. Dengan demikian persentase penduduk miskin pada tahun 2015 menjadi lebih meningkat. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin diperkirakan 11 ribu jiwa atau 14,46 persen, sedangkan di tahun 2015 jumlah penduduk miskin menjadi 11,8 ribu jiwa atau 15,45 persen. (BPS, 2016)

Isu dasar lainnya yaitu tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberhasilan pembangunan manusia suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah yang merefleksikan ke-3 komponen utama IPM, yaitu: indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli (*pucharsing power*). Dengan demikian IPM merefleksikan tingkat perkembangan pendidikan, tingkat perkembangan pembangunan kesehatan, dan taraf hidup/ kondisi ekonomi masyarakat pada suatu wilayah. Secara umum posisi pembangunan manusia Muna Barat masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah 62,57 atau berada pada urutan ke-14 dari 17 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun demikian, capaian IPM Kabupaten Muna Barat berada pada kategori yang sama dengan IPM Sulawesi Tenggara yakni berada pada Kategori Sedang.

Pembangunan manusia bidang pengeluaran dan pendidikan di Muna Barat menunjukkan hasil yang mulai membaik. Namun untuk bidang kesehatan, pembangunan Muna Barat mengalami stagnasi sehingga membutuhkan program percepatan pembangunan. Capaian pembangunan manusia bidang kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup (AHH). Angka harapan hidup di Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2015 sebesar 70,39 tahun lebih tinggi dibanding Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Muna Barat sebesar 69,76. Untuk dapat mencapai Angka harapan

hidup (AHH) yang bisa mendekati AHH Sulawesi Tenggara, program dibidang kesehatan harus semakin ditingkatkan pada tahun mendatang.

Capaian pembangunan manusia bidang pendidikan yang diukur dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah Sulawesi Tenggara tahun 2015 sebesar 13,07 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,18 tahun. Sedangkan untuk Kabupaten Muna Barat Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2015 sebesar 11,62 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 6,23 tahun. Dari kedua indikator pendidikan tersebut (HLS dan RLS) capaian Kabupaten Muna Barat masih relatif jauh tertinggal dibanding dengan capaian indikator pendidikan Sulawesi Tenggara. Dengan demikian diharapkan upaya-upaya peningkatan capaian indikator pendidikan tersebut harus lebih ditingkatkan melalui berbagai program yang lebih baik dengan dukungan pendanaan yang lebih memadai. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah sebesar 94.93% atau angka pengangguran sebesar 5.07%. Ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pengangguran tertinggi pada kaum perempuan yakni sebesar 6.20%, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebesar 3.96%.

Capaian pembangunan manusia bidang pengeluaran yang diukur dari pengeluaran perkapita (PPP) di Sulawesi Tenggara sebesar 8.697 ribu rupiah pada tahun 2015, sedangkan Kabupaten Muna Barat sebesar 7.063 ribu rupiah. Dari 17 kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat menempati urutan ke-12 dalam hal capaian kemampuan daya beli berada di atas Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan gambaran perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Muna Barat, ada minimal 3 (tiga) hal yang perlu dicermati dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara yakni:

- (1) Capaian pembangunan manusia dari indikator besaran pengeluaran perkapita (PPP) Muna Barat lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Kecepatan pembangunan manusia bidang kelayakan hidup di Muna Barat lebih rendah dibanding Sulawesi Tenggara.
- (3) Pencapaian indeks kelayakan hidup di Muna Barat cenderung lebih rendah dibanding Sulawesi Tenggara.

Kualitas masyarakat Kabupaten Muna Barat yang relatif masih rendah yang ditandai dengan kualitas pendidikan yang masih belum baik, akses kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas masih kurang, pendapatan yang rendah, dan kebutuhan kalori belum mencukupi mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidak cukupan pengeluaran/belanja, kesehatan yang rendah, pendidikan rendah, terisolir secara sosial, rasa tidak

nyaman, kurangnya kebebasan dan beraspirasi, serta ketidakberdayaan. Penurunan penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai komponen/stakeholder.

Tanpa adanya penanganan yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah kemiskinan baru. Munculnya permasalahan baru menyebabkan kecenderungan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Indikasi kemiskinan terlihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat khususnya kalangan petani akibat dari masih rendahnya nilai tukar produk pertanian dan fluktuasi harga produk pertanian. Disamping itu, meningkatnya jumlah pencari kerja dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan perluasan/penciptaan lapangan pekerjaan baru akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, di awal tahun RPJMD Muna Barat kondisi jalan di Kabupaten Muna Barat umumnya dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini sangat membebani pengguna jalan baik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun biaya operasional kendaraan dan berdampak pada terganggunya mobilitas ekonomi masyarakat. Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah 517.58 km atau meningkat 4.67% dibanding dengan panjang Jalan Kabupaten tahun 2015. Berdasarkan tingkat kerusakan permukaan jalan, kondisi jalan yang baik dan sedang di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 meningkat secara signifikan dibanding tahun 2015. Pada tahun 2016 proporsi jalan dalam kondisi baik telah mencapai 34.55% dan tahun 2015 yang hanya mencakup 21.37. Fasilitas penunjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Muna Barat khususnya drainase jalan sampai tahun 2016 belum tersedia. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Muna Barat. Pembangunan Drainase menjadi sangat prioritas untuk mengurangi dampak terjadinya banjir.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 54.46%. Minimnya rumah tangga pengguna air bersih disebabkan oleh minimnya ketersediaan sarana dan prasarana jaringan air bersih dan belum adanya pengelola/ perusahaan daerah Air minum (PDAM). Jumlah rumah bersanitasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 32.66%. Rumah tangga tidak bersanitasi umumnya ditemukan pada keluarga berpenghasilan rendah/ miskin.

Dalam pembangunan pertanian dalam arti luas, tantangan dan permasalahan serius yang akan dihadapi adalah memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan yang bertumpu pada produksi lokal. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah produksi padi/bahan pangan utama di Kabupaten Muna Barat adalah 2.910 Ton. Keseluruhan produksi tersebut berasal dari kelompok tani. Hal ini berarti bahwa seluruh (100%)

produksi padi/bahan pangan utama lokal dihasilkan oleh kelompok tani (Dinas Pertanian dan Pangan, 2017).

Luas area tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 tercatat sebanyak 1.170 Ha, dengan hasil produksi sebesar 3.223,5 Ton. Hal ini menunjukkan bahwa Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah sebesar 3.6 Ton/ ha (Dinas Pertanian dan Pangan, 2017).

Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan ketahanan pangan adalah kemampuan produksi pangan, pertanian, dan perikanan yang akan menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumber daya alam. Pada satu sisi, peningkatan permintaan akan bahan pangan terjadi seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya daya beli dan selera masyarakat akan bahan pangan, yang dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya lahan akan menjadi kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan kemampuan produksi komoditas pangan. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke non pertanian, degradasi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan, serta dampak negatif dari fenomena perubahan iklim, juga akan menjadi permasalahan lain yang akan mengurangi kemampuan produksi bahan pangan dalam lima tahun ke depan.

Produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu terus ditingkatkan. Selain permasalahan dan tantangan yang telah disebutkan di atas, kendala lain yang dihadapi adalah jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih). Peningkatan produksi dan produktivitas juga masih memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam aspek input produksi maupun penanggulangan penyakit tumbuhan/tanaman dan kesehatan hewan/ikan, serta teknologi pengolahan kayu di sektor kehutanan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan kehutanan sangat mempengaruhi upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana antara lain, ditunjukkan oleh jumlah pelabuhan dan armada perikanan belum tersedia secara cukup. Selain itu, armada perikanan masih didominasi oleh kapal ikan skala kecil dengan kemampuan penangkapan yang terbatas berakibat pada rendahnya tingkat produksi perikanan tangkap. Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan semakin kerapnya terjadi badai dan bencana alam lain yang turut menghambat upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Kendala pembangunan kehutanan diakibatkan oleh belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, serta masih tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan. Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum tersosialisasikan/ terselesaikannya tata batas kawasan hutan. Ketidakjelasan tata batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali. Selain itu, masih tingginya kawasan hutan berstatus '*open access*' juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan.

Dalam upaya lebih memantapkan Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten Muna Barat Tahun 2019, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan dengan memperhatikan isu-isu strategis Nasional, isu-isu Startegis serta standar pelayanan minimal yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Dalam hal pembangunan kesehatan, Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat namun aksesibilitas masyarakat terutama penduduk miskin di daerah tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau kecil terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas. Walaupun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya sudah cukup bagus, kualitas pelayanannya masih perlu ditingkatkan, terutama pelayanan kesehatan preventif dan promotif. Untuk itu, kinerja puskesmas di bidang pelayanan kesehatan preventif dan promotif yang meliputi KIA-KB, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polindes, dan poskesdes perlu ditingkatkan.

Di beberapa desa masih terdapat penduduk yang mengalami kendala jarak dan waktu untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi jaringan jalan dan listrik belum memadai. Disamping itu, pada pulau-pulau kecil masih kurang tersedia sarana angkutan laut yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas/ rumah sakit.

Dalam kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tidak terlepas permasalahan yang muncul dan mempengaruhi kinerja organisasi yang berdampak pada orientasi hasil yang akan dicapai. Permasalahan bukanlah kendala yang menjadikan menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan, melainkan dengan adanya masalah akan membuka peluang solusi dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang bermanfaat bagi peningkatan mutu dan kinerja yang lebih produktif.

Sumber daya Bappeda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa isu – isu strategis eksternal yang saat ini dihadapi Bappeda, antara lain:

1. Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal
2. Akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja masih lemah;
3. Minimnya Sumber daya Aparatur yang memiliki kompetensi Bidang Perencanaan Pembangunan
4. Potensi pengembangan Pembangunan Sosial Budaya Daerah belum sepenuhnya dipetakan
5. Potensi pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah belum sepenuhnya dipetakan
6. Potensi pengembangan Pembangunan Sumber Daya Alam belum sepenuhnya dipetakan
7. Potensi pengembangan Infrastruktur Wilayah belum sepenuhnya dipetakan
8. Belum efektifnya Pelaksanaan koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

Disamping isu-isu strategis tingkat kabupaten tersebut, Bappeda secara internal juga memiliki beberapa isu strategis, diantaranya kompetensi kapasitas SDM yang terbatas dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan, khususnya tenaga fungsional perencana yang bersertifikasi. Adapun SDM yang tersedia saat ini perlu ditingkatkan lagi kapasitas dan kemampuannya karena dapat dirasakan bahwa SDM perencana saat ini masih kurang daya kreatifitas dan analitik untuk menciptakan Inovasi yang terbaru dalam perencanaan. Kemudian belum optimalnya koordinasi antar sub unit dalam organisasi, belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan yang kredibel. Dalam melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi dirasakan masih belum optimal, belum mampu menjangkau seluruh unsur perencanaan daerah. Kemudian belum optimalnya ketersediaan, validitas, pengelolaan dan pengintegrasian databerbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat serta belum optimalnya pengelolaan

data base dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.

Disamping itu, kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada penyusunan rencana pembangunan juga belum optimal dilakukan. Dalam hal kelembagaan, perubahan struktur yang baru-baru ini dilakukan juga masih memerlukan adaptasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengampu ketugasan Bappeda sebagai lembaga perencana di tingkat daerah.

Selain itu, ditengah perubahan-perubahan besar yang terjadi diberbagai aspek dan tingkatan, ada beberapa potensi yang mendukung sekaligus dalam skala tertentu menjadi tantangan bagi Bappeda dalam jangka waktu Lima tahun kedepan. Berikut merupakan beberapa potensi tersebut diantaranya:

1. Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
2. Semangat otonomi dan desentralisasi yang kuat.
3. Potensi sumber daya daerah menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan pembangunan.
4. Kultur dan sosial yang kuat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.
5. Jumlah dan kualitas penduduk yang cukup memadai.
6. SDM Bappeda dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
7. Anggaran yang cukup memadai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rumusan visi misi sejatinya mengacu pada permasalahan dan potensi pembangunan daerah sebagai isu strategis yang harus diselesaikan dalam program jangka menengah yang sejalan dengan tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Muna Barat, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, serta prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka Visi Kabupaten Muna Barat adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH
NILAI-NILAI RELIGIUS”**

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*key words*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Muna Barat. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti

strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang jelas, terarah, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi. Kata kunci atau pokok-pokok dari visi yang dimaksud adalah **Sejahtera, Demokratis, Produktif, Berdaya Saing, dan Religius**.

1. **Sejahtera:** Merefleksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah Muna Barat yang berkeadilan ditopang oleh pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada agropolitan dan minapolitan.
2. **Demokratis:** Penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terefleksikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), dan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, bernegara yang harmonis dan toleran..
3. **Produktif:** Merefleksikan pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
4. **Berdaya Saing:** Merefleksikan keberadaan infrastruktur Wilayah yang memadai dan berkualitas dalam mendukung Penataaan dan daya saing pengembangan Wilayah khususnya pada pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pembangunan Desa, dan Pulau-Pulau Kecil; dan merefleksikan pengelolaan Pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta Pelestarian/ pengembangan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal.
5. **Religius:** Merefleksikan masyarakat Kabupaten Muna Barat memiliki jati diri sebagai insan yang berbudaya, Berkarakter, Berbudi Pekerti Luhur, dan berakhlak mulia dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama yang harmonis dan toleran.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dirumuskanlah misi Pemerintah Kabupaten Muna Barat adalah:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur
- Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas
- Misi 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan
- Misi 4 : Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kabupaten Muna Barat, Bappeda turut bertanggungjawab dalam mewujudkan kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Bappeda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Bupati terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi kedua yaitu **“Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Wilayah Yang Memadai dan Berkualitas”** serta misi kelima, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Efektif, Partisipatif, Transparan dan Bermartabat”**. Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien memiliki tolok ukur Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana sasarnya adalah meningkatnya tingkat kepuasan Pelayanan Publik dan indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sektor, merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Pada misi **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat**, terkait dengan banyak OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, satu diantaranya adalah Bappeda. Seperti yang telah disinggung, misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimana indeks reformasi birokrasi dijadikan tolok ukur keberhasilan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien, Peningkatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, Peningkatan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Seluruh Masyarakat, Penguatan kepastian hukum terhadap hak - hak tanah Milik Masyarakat dan Pemerintah, Peningkatan Kapasitas Manajemen pemerintahan desa.

. Tugas Bappeda, selain secara langsung ikut berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintah dalam bidang perencanaan, adalah dengan

turut mengkoordinasikan OPD terkait yang ikut berperan dalam mewujudkan misi untuk memastikan tercapainya misi tersebut.

Pada misi ***Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Wilayah Yang Memadai dan Berkualitas***, sangat terkait dengan OPD khususnya ke PU an. Pada misi ini Bappeda berperan dalam menyusun perencanaan untuk pengembangan wilayah-wilayah strategis. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Muna Barat membutuhkan pengembangan wilayah dan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang mampu melayani kebutuhan ekonomi masyarakat. Tugas Bappeda yaitu menyiapkan perencanaan wilayah kawasan strategis dan mensinergikan program antar berbagai OPD.

Selain misi yang kelima sebagai prioritas, Bappeda berperan untuk pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan. Bappeda sebagai institusi perencanaan daerah memiliki fungsi koordinatif untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan perencanaan dalam tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Misi Pertama, "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur". menekankan pada pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi dan berakhlak mulia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Pendidikan PAUD, SD/MI, dan SMP/ Sederajat secara merata dan berkeadilan, dengan mendorong: Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan, peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan, pengembangan pendidikan non formal, dan Pembinaan prestasi dan kreatifitas Siswa dan Guru.
- (2) Pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Kesehatan Dasar dan Layanan Kesehatan Rujukan, dengan mendorong: Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan, Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga Kesehatan, dan pengembangan tata kelolah dan standar operasional prosedur layanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing.
- (3) Pengembangan Prestasi dan budaya olahraga, dengan mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga,meningkatkan pembinaan olahraga, serta memberikan penghargaan bagi atlit yang berprestasi di tingkat provinsi dan Nasional/ Internasional.
- (4) Peningkatan peran serta dan kreatifitas kepemudaan dalam pembangunan
- (5) Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja untuk memenuhi pangsa pasar tenaga kerja dalam Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), dengan mendorong

pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja serta pembangunan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.

- (6) Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar.
- (7) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (8) Peningkatan ketahanan keluarga Berencana dan keluarga sejahtera.
- (9) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pada seluruh sektor pembangunan.

Misi Kedua,” Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas’, menekankan pada pembangunan Infrastruktur dalam rangka peningkatan akses pelayanan publik, Penataan wilayah sesuai RTRW, dan peningkatan akses pintu keluar masuk wilayah Kabupaten Muna Barat. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam rangka menjamin adanya interkoneksi antara Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah,
- (2) Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam rangka mendorong produktifitas pemanfaatan lahan pada daerah-daerah yang memiliki petensial pengembangan ekonomi lokal
- (3) Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam rangka menata kawasan pusat-pusat kegiatan publik
- (4) Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan Rakyat dalam rangka meningkatkan akses pelayanan daerah-daerah terisolir, daerah-daerah pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (5) Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan/ Dermaga Latawe, Pajala, dan Tondasi sebagai Pintu Keluar Masuk antar Pulau dalam mendukung mobilitas Barang dan Jasa.
- (6) Mendorong Pengembangan Bandara Udara Sugimanuru.
- (7) Pembangunan Drainase dalam rangka mengurangi resiko bencana banjir terhadap kerusakan jalan dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- (8) Pembangunan Sarana Penerangan Jalan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keselamatan lalu lintas.
- (9) Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Irigasi
- (10) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- (12) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan mendorong Peran BUMD/ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

(13) Pengendalian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Misi Ketiga, "Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan", menekankan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan sektor-sektor berbasis agropolitan dan Minapolitan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah kemampuan pengelolaan Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan dengan mendorong Inovasi dan Investasi.
- (2) Peningkatan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- (3) Peningkatan Peran Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak terdepan dalam mendorong Kesejahteraan Petani.
- (4) Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dengan menerapkan konsep *one district one product* (ODOP) dan *one village one product* (OVOP) sebagai basis pengembangan potensi lokal
- (5) Mengembangkan industri Pengolahan dalam peningkatan nilai tambah komoditi sektor-sektor unggulan daerah.
- (6) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong peran Koperasi dan UMKM dalam membangun Ekonomi Lokal.
- (7) Peningkatan Akses Pasar Komoditi unggulan daerah, dengan mendorong kegiatan perdagangan antar daerah.
- (8) Penciptaan Iklim Investasi yang berkelanjutan

Misi Keempat, "Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal", menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Pengembangan/ Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan
- (2) Pengembangan/ Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan
- (3) Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi Kelima, " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat", menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Muna Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Govemerment and Clean Governance*. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Penyelenggaraan Birokrasi Modern yang berorientasi pada Pelayanan Publik yang mengedepankan Akuntabilitas, Kualitas, Inovasi, dan Koperatif (AKuIKo), yang ditunjang dengan Aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, sistem prosedur dan tata kerja yang Inovatif (Kemudahan akses, cepat, bermutu, dan memuaskan), dan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang nyaman dan representatif.
- (2) Penegakan Disiplin Aparatur yang diikuti dengan Pemberian Insentif/ Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan secara partisipatif.
- (4) Tata kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan.
- (5) Peningkatan Kinerja APIP (aparatur pengawas internal pemerintah) dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- (6) Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan menghormati keberagaman agama dan suku.
- (7) Penciptaan Kondisi Ketentraman dan Ketertiban masyarakat melalui prakarsa dan kemitraan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara

Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
- b. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawa Cita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga Negara.

- Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah:

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1)

Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara *evidence based*; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument*; (5) meningkatkan sosialisasi *tools* dan *instrument* terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk:

1. Membangun hubungan yang efektif,
2. Memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,
3. Sinkronisasi pembangunan lintas wilayah,
4. Sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah,
5. Analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah,
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah,
7. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah, dan
8. Meningkatkan sosialisasi *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah,

Arah kebijakan ini menjadi bahan yang segar bagi Bappeda Kabupaten Muna Barat untuk memanfaatkan fokus kebijakan Bappenas tersebut. Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2019. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki ifungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab

terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2019 yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategisnya adalah: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan Bertanggung Jawab”.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencanaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku. Sementara itu Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka upaya-upaya yang akan dilakukan, dituangkan dalam beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rumusan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, lebih lanjut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu:

1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional;
2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;
3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan ketiga sasaran pembangunan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas, rencananya dicapai melalui 12 program prioritas. Telaah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kaitannya dengan kepentingan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat memunculkan beberapa permasalahan pelayanan OPDbeserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya yangdapat diidentifikasi sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Prov. Sultra	Permasalahan Pelayanan Bappeda Muna Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	SDM Perencana yang berkualitasdan profesional	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Belum adanya tenaga fungsional perencana pada Bappeda Muna Barat	Tersedianya pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan formal
2	Mekanisme perencanaan yang transparan partisipatif dan inovatif	Belum adanya system pendampingan perencanaan per-rumpun OPD	Koordinasi antar stakeholder perencanaan pembangunandaerah di Kabupaten Muna Barat yang belum optimal	Mulai terbangunnya system informasi yang mendukung peningkatan kinerja perencanaan Bappeda Muna Barat
3	Perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah yang berkualitas serta tersedianya data / informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Kurangnya ketersediaan data dan infoermasi pembangunanDerah	Kompleksitas data / informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Sementara akurasi dan ketepatan data perencanaanmasih minim	Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data / informasi perencanaan pembangunan

Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis jangka menengah pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu (1) Tersedianya dokumen perencanaan (2) Tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu (3) Terciptanya sistem perencanaan yg terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah (4) Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (5) Terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung.

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bappeda provinsi Sulawesi tenggara perlu didukung dengan instansi Bappeda di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas,

Pemerintah Provinsi oleh Bappeda Sulawesi Tenggara dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa visi penataan ruang wilayah Kabupaten Muna Barat diarahkan untuk : “Mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.” Adapun misi penataan ruang wilayah Kabupaten Muna Barat adalah :

- a. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Muna Barat disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;
- b. Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Muna Barat adalah terciptanya Kabupaten Muna Barat sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam Pembangunan 5 tahun mendatang.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat danPendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Muna Barat	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Dibutuhkan data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian dan juga data / informasi tentang sebaran SDA di wilayah pedesaan	Keterbatasan aksesibilitas terhadap data / informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian, sebaran SDA di wilayah pedesaan serta tataruang permukiman dan prasarana wilayah di	Kompleksitas data / informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim	Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/ informasi perencanaan pembangunan
2	Dibutuhkan data / informasi tentang tata ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah pedesaan			

		wilayah perdesaan		
3	Tuntutan terhadap Bappeda agar mampu mengkoordinasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan industri dan perdagangan di wilayah perkotaan sehingga tidak berdampak negative terhadap aspek berkelanjutan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup)	Keterbatasan kewenangan Bappeda untuk menjangkau aspek-aspek teknis implementasi pembangunan misalnya, dalam hal pengembangan industri dan perdagangan, serta penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah	Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sector dan lintas OPD yang masih lemah	Adanya usaha untuk menumukan model dan pendekatan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sector dan lintas OPD yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika di dalam system pemerintahan di Kabupaten Muna Barat
4.	Bappeda dituntut untuk mampu mengendalikan penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perkotaan yang perkembangannya sangat cepat dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi, melalui koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar sejalan dengan system dan fungsi perwilayahan yang telah ditetapkan dalam RTRW			

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Muna Barat, didapatkan beberapa permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Bappeda yakni sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian penggunaan lahan;
2. Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah limbah domestik, limbah industri/perusahaan;
3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaantata kelola/ administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik;
4. Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan Desa/ Kelurahan;

5. Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola);
6. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil pertanian;
7. Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai;
8. Masih rendahnya mutu pendidikan (terutama tenaga pendidik).

Bappeda Kabupaten Muna Barat sebagai perencana perlu menyusun rencana pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah implementasi perencanaan, sehingga lokasi dan kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan padatugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPDsendiri dan permasalahan-permasalahan yangtidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2022 yakni:

1. Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program ;
2. Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas;
3. Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat;
4. Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi;
5. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana;
6. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
7. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
8. Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal;
9. Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun OPD;
10. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
11. Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat;

12. Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan;
13. Dukungan Program / Kegiatan yang berasal dari CSR dan Lembaga Donor dalam Perencanaan Pembangunan;
14. Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah;
15. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
16. Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan;
17. Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
18. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan.

Yang dapat menjadi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Muna Barat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 yang terkait tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat adalah isu strategis yaitu : ***“Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja”***. Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka rumusan isu strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat pada 5 (lima) tahun kedepan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
3. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.
6. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan dan juga permasalahan lain secara komprehensif dan terpadu.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda Muna Barat

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda di presentasikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	2	3	3	4	4	4
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Meningkatkan tingkat kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%	100%

Tujuan jangka menengah Bappeda Muna Barat secara umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 adalah 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung, penataan dan pengembangan wilayah; 2) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat; 3) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh, Meningkatkan tingkat kepuasan Pelayanan Publik, serta Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diformulasikan sebagai berikut:

Indikator	Formulasi
Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang dibangun
Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai penimbang
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu	dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan OPD yang disampaikan tepat waktu dibagi Jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran OPD dikali 100%

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Muna Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat tumbuh, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Mengoptimalkan Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur kawasan Minapolitan dan Agropolitan
 - b. Mengoptimalkan Perencanaan dan meningkatkan pembangunan Infrastruktur kawasan Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
2. Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi dan efektifitas Pelayanan Perkantoran sesuai Standar Operasional dan Prosedur

- b. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai tuntutan kebutuhan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
 - c. Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian secara otomatis
 - d. Menegakan Displin ASN
 - e. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionisme sumber daya aparatur daerah
 - f. Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan
 - g. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pengelolaan Perekonomian Daerah serta membentuk layanan Badan Usaha Milik Daerah
 - h. Mengoptimalkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan, Monitoring, dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perencanaan dan pengendalian/ evaluasi pembangunan tahunan dan jangka menengah
 - b. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender.
 - c. Meningkatkan ketersediaan *Road Map*/ Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Ekonomi
 - d. Meningkatkan ketersediaan *Road Map*/ Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 - e. Meningkatkan ketersediaan *Road Map*/ Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
 - f. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Tim Work Aparat Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Peningkatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam mendukung Kualitas Perencanaan pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan lainnya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah
 - b. Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara terpadu dengan melakukan updating secara berkala
 - c. Mengembangkan kerjasama dengan BPS untuk penggandaan buku statistik dasar dalam mendukung ketersediaan data perencanaan pembangunan
 - d. Mengembangkan statistik sektoral untuk mendorong ketersediaan data sektor yang akurat dan terkini
5. Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang berorientasi pada Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, dengan arah

- kebijakan yaitu Meningkatkan efektifitas rekomendasi hasil-hasil Kajian/ Studi Penelitian untuk percepatan pembangunan Daerah dan pengembangan Wilayah.
6. Peningkatan Publikasi Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda dengan arah kebijakan yaitu Mengoptimalkan Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda.

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda

Visi: Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius			
Misi 2: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Peningkatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat tumbuh	Mengoptimalkan Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur kawasan Minapolitan dan Agropolitan
			Mengoptimalkan Perencanaan dan meningkatkan pembangunan Infrastruktur kawasan Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat			
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Meningkatkan tingkat kepuasan Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalisasi dan efektifitas Pelayanan Perkantoran sesuai Standar Operasional dan Prosedur
			Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai tuntutan kebutuhan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
			Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian secara otomatis
			Menegakan Displin ASN
			Meningkatkan Kompetensi dan Profesionlisme sumber daya aparatur daerah
			Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan
			Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pengelolaan Perekonomian Daerah serta membentuk layanan Badan Usaha Milik Daerah
			Mengoptimalkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan, Monitoring, dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Meningkatkan Efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perencanaan dan pengendalian/ evaluasi pembangunan tahunan dan jangka menengah
			Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender.
			Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map</i> /Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Ekonomi
			Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map</i> /Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat			
			Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map</i> /Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
			Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Tim Work Aparat Perencanaan Pembangunan Daerah
		Peningkatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam mendukung Kualitas Perencanaan pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan lainnya	Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah
			Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara terpadu dengan melakukan updating secara berkala
			Mengembangkan kerjasama dengan BPS untuk penggandaan buku statistik dasar dalam mendukung ketersediaan data perencanaan pembangunan
			Mengembangkan statistik sektoral untuk mendorong ketersediaan data sektor yang akurat dan terkini
		Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang berorientasi pada Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah,	Meningkatkan efektifitas rekomendasi hasil-hasil Kajian/ Studi Penelitian untuk percepatan pembangunan Daerah dan pengembangan Wilayah
		Peningkatan Publikasi Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda	Mengoptimalkan Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda\

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program dan indikator kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Muna Barat disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 – 2022.

6.1. Non Urusan

Untuk mendukung visi, misi, strategi dan kebijakan Renstra Bappeda Tahun 2017 – 2022, program Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pencapaian Kinerja dan Keuangan.

6.2. Urusan

1. Sekretariat
 - a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a) Program Perencanaan Tata Ruang
 - b) Program Pengembangan Perumahan
 - c) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Bidang Ekonomi

- a) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- b) Program Pengembangan Perumahan
- c) Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
- d) Program Pengembangan Kerjasama

4. Bidang Sosial Budaya

- a) Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
- b) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

5. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pelaporan

- a) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
- b) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

.

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB	
											2017		2018		2019		2020		2021					2022
											Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		Target
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat							Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Tidak Baik/ Kurang Baik/ Baik/ Sangat Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Sangat Baik				
	Meningkatkan tingkat kepuasan Pelayanan Publik						Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Tidak Baik/ Kurang Baik/ Baik/ Sangat Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Sangat Baik				
		4	3	01		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	%	100	100	700	100	922	100	930	100	940	100	950	98%	960	83	5.402	Bappeda
		4	3	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	%	100	100	1,11	100	1,2	100		100	1,32	100	1,32	100	1,45	100	6,4	Bappeda
		4	3	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan air	Liter			7		189				207,9		207,9		228,69		840,49	Bappeda	
		4	3	01		Kebutuhan listrik	Kwh																	
		4	3	01		Kebutuhan komunikasi	Unlimited																	
		4	3	01		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Unit		14	7,6	14	14,35			15,79	14	15,79	14	17,36	14	70,88	Bappeda	
		4	3	01		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah anggota tim pengelola jasa keuangan	Orang			96		93,6				102,96		102,96		113,26		508,78	Bappeda
		4	3	01		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	%	100	100	10	100	10	100		100	11	100	11	100	12,1	100	54,1	Bappeda
		4	3	01		Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan jenis alat tulis kantor	%	100	100	38,64	100	40	100		100	44	100	44	100	48,4	100	215,04	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
										2017		2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
		4	3	01		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak, foto copy, dan jilid	%	100	100	29	100	31	100		100	34,1	100	34,1	100	37,51	100	165,71	Bappeda
		4	3	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat listrik	%	100	100	5	100	5,5	100		100	6,05	100	6,05	100	6,66	100	29,26	Bappeda
		4	3	01		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Item		7	302,95	8	20	8		0	22	7	22	7	24,2	7	391,15	Bappeda
		4	3	01		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis surat kabar/majalah yang tersedia	Buah	180	180	9	180	7,2	180		180	7,92	180	7,92	180	8,71	180	40,75	Bappeda
		4	3	01		Penyediaan makanan dan minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman rapat	%	100	100	30	100	15	100		100	16,5	100	16,5	100	18,15	100	96,15	Bappeda
		4	3	01		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase penyelesaian rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah	%	100	100	276,25	100	350	100		100	385	100	385	100	423,5	100	1.819,75	Bappeda
		4	3	01		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga honorer/Pegawai Tidak Tetap	Orang		16	114,9	16	144,8	16		16	159,28	16	159,28	16	175,21	16	753,47	Bappeda
		4	3	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keberadaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	20	40	670	70	270	75	250	80	250	85	250	90	2.500	90	4.190	Bappeda
						Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan	Unit		2	500	-				1	250	1	250	-			1.000,00	Bappeda
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Item		5	-	5	15	5		5	25	5	31,25	5	35,94	5	107,19	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
										2017		2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	Item		5	-	5	60	5		5	55	5	68,75	5	79,06	5	262,81	Bappeda
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dirawat	Unit		14	150	14	174,6	14		14	180	14	225	14	258,75	14	988,35	Bappeda
						Pemeliharaan/Penataan Lingkungan Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan/ penataan lingkungan gedung kantor	%	40	100	40	100	20	100		100	45	100	56,25	100	64,69	100	225,94	Bappeda
		4	3	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase penggunaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	%	90	100	35	100	44	100	46	100	50	100	50	100	50	100	275	Bappeda
							Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	%	97	100		100		100		100		100						
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas ASN	%		-	-	100	44	-	-	100	55	-	-	100	55	100	154	Bappeda
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase pemenuhan pakaian seragam olah raga dan pakaian tenunan daerah ASN	%		100	35	-	-	-	-	-	100	45	-	-	100	80	Bappeda	
		4	3	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	%	40	50	170	60	297	70	250	80	250	90	250	100	250	100	1.467	Bappeda
						Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	-	5	170	10	297,35	-									Bappeda	
						Pendidikan dan pelatihan Non formal	Jumlah ASN dan PTT yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	-	5	160	-	-	-									Bappeda	

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB	
											2017		2018		2019		2020		2021					2022
											Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah							Capaian akses daerah-daerah potensial dan pusat-pusat pengembangan wilayah yang terkoneksi	%			80%		85		87		89		91		93			Bappeda
	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh						Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	Kawasan	2	2		3		3		4		4		0		4		Bappeda
		4	3	16		Peogram Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Keberadaan Master Plan tematik pengembangan Wilayah Strategis	%	20	50	-	60	420	65	420	70	420	75	420	80	420	80	2.100	Bappeda
		4	3	16	03	Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Dokumen	Belum Ada	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda
		4	3	16	04	Penyusunan Master Plan Penataan Kampung Nelayan	Tersedianya Master Plan Penataan Kampung Nelayan	Dokumen	Belum Ada	-	-	-	-	1	200	1	200	1	200	-	-	3	600	Bappeda
		4	3	16	05	Penyusunan DED dan FS Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional	Tersedianya dokumen DED dan FS Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional	Dokumen	Belum Ada	-	-	1	120	1	220	-	-	1	220	-	-	3	560	Bappeda
		4	3	16	06	Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Benteng Tiworo	Tersedianya dokuemn Master Plan Kawasan Strategis Benteng Tiworo	Dokumen	Belum Ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220	1	220	Bappeda
		4	3	16	07	Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Pesisir dan pulau-Pulau Keci	Tersedianya dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Pesisir dan pulau-Pulau Keci	Dokumen	Belum Ada	-	-	-	-	-	-	1	220	-	-	-	-	1	220	Bappeda
		4	3	16	08	Penyusunan Database Kawasan Kumuh Kabupaten Muna Barat	Tersedianya dokuemn Database Kawasan Kumuh Kabupaten Muna Barat	Dokumen	Belum Ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1	200	Bappeda
		4	3	17		Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar	Persentase Master Plan tematik pengembangan Wilayah Strategis	%	20	50	925	60	-	65	-	70	-	75	-	80	-	80	925	Bappeda
		4	3	17	01	Penyusunan Master Plan Pembangunan Prasarana Terminal	Tersedianya dokumen Master Plan Pembangunan Prasarana Terminal	Dokumen	Belum Ada	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
										2017		2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
		4	3	17	02	Penyusunan Master Plan Persampahan	Tersedianya dokumen Master Plan Persampahan	Dokumen	Belum Ada	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda	
		4	3	17	03	Pemutakhiran Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Program Nasional PPSP Tahun 2017	Tersedianya dokuemn Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Program Nasional PPSP Tahun 2017	Dokumen	Belum Ada	1	225	-	-	-	-	-	-	-	-	1	225	Bappeda		
		4	3	17	04	Reviu Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota	Tersedianya dokumen hasil Reviu Dokumen Strategi Sanitasi Kota	Dokumen	Belum Ada	-	-	1	120	1	-	1	-	1	-	5	120	Bappeda		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)						Persentase Aparatur yang bebas dari kasus korupsi	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Bappeda		
	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu	%		70		80		90		100		100		100			Bappeda		
		4	3	18		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kelembagaan/ Pokja perencanaan pembangunan daerah yang diberdayakan	%	100	100	575	100	441	100	450	100	450	100	450	100	2.816	Bappeda		
		4	3	18	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah keikutsertaan aparat perencana dalam peningkatan kompetensi teknis	kegiatan/tahun	1	1	75	1	150	1	200	1	200	1	200	6	1.025	Bappeda		
		4	3	18	04	Pembentukan pokja Pelaporan Dana Alokasi Khusus	Jenis Laporang yang dibuat	Laporan	Belum Ada	4	150	4	291	4	250	4	250	4	250	24	1.441	Bappeda		
		4	3	18	07	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)	Tersedianya website	Website	Belum Ada	1	350	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350	Bappeda		
		4	3	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keberadaan Perkada RKPD, MoU KUA/ PPAS dan perubahannya	Ada/Tidak Ada	Ada	2.126	1.080	1.090	1.100	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120	7.626	Bappeda				
							Keberadaan Loporan pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Pembangunan	Ada/Tidak Ada	Ada															

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
										2017		2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
							Keberadaan perda RPJPD Kab. Muna Barat	Ada/Belum Ada	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
							Keberadaan Perda RPJMD kab. Muna Barat	Ada/Belum Ada	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
		3	3	19		Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD	Dokumen	1	1	75	1	61	1	63	1	63	1	63	6	388	Bappeda		
		3	3	19		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penetapan RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD dan Penetapan RKPD dengan Perbup	Dokumen	1	1	180	1	302	1	277	1	280	1	285	1	290	6	1.615	Bappeda
		3	3	19		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan	-	1	10	1	5	4	25	4	25	4	25	4	25	18	115	Bappeda
		3	3	19		Penyusunan Dokuemn Perubahan KUA dan PPA	Tersedianya Dokuemn Perubahan KUA dan PPA	Dokumen	1	1	110	1	82	1	85	1	87	1	87	1	87	6	538	Bappeda
		3	3	19		Penyusunan Dokumen KUA dan PPA	Tersedianya Dokumen KUA dan PPA	Dokumen	1	1	110	1	82	1	85	1	87	1	87	1	87	6	538	Bappeda
		3	3	19		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang	Kecamatan	11	11	41	11	27	11	30	11	30	11	30	11	30	11	188	Bappeda
		3	3	19		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1	1	350	1	400	1	400	1	400	1	405	1	410	6	2.365	Bappeda
		3	3	19		Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja OPD dan Rapat Evaluasi Provinsi	Persentase keikutsertaan OPD dalam rapat evaluasi	%	90	95	75	95	62	97	65	100	65	100	65	100	65	100	397	Bappeda
		3	3	19		Penyusunan RKPD Perubahan	Tersedianya dokumen RKPD Perubahan yang ditetapkan dengan Perbup	Dokumen	1	1	75	1	58	1	60	1	60	1	60	1	60	6	373	Bappeda
		3	3	19		Penyusunan Dokuemn RPJMD dan Penetapan RPJMD	Tersedianya Dokuemn RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Dokumen	-	1	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	700	Bappeda	
		3	3	19		Penyusunan Dokuemen RPJPD dan Penetapan RPJPD	Tersedianya Dokuemen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Dokumen	-	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400	Bappeda	
		3	3	19		Penyusunan LKPJ Bupati Muna Barat	Tersedianya dokumen LKPJ Bupati Muna Barat	Dokumen	-	-	-	-	-	1	25	1	25	1	25	1	25	4	100	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
										2017		2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
		3	3	19		Revisi RPJMD	Tersedianya dokumen Revisi RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Dokumen	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	Bappeda	
		4	3	20		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Keberadaan Masterplan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah	%	40	60	1.100	65	100	70	100	75	100	80	100	85	100	1.600	Bappeda	
							Persentase rekomendasi Kelembagaaan/ Pokja Pembangunan Ekonomi Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100				100
							Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan ekonomi Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100				100
		4	3	20	01	Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Agropolitan	Dokumen	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	Bappeda	
		4	3	20	02	Penyusunan dan Analisis Data Potensi Sentra Peternakan Rakyat	Tersedianya Dokumen Data Potensi Sentra Peternakan Rakyat	Dokumen	-	1	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350	Bappeda	
		4	3	20	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD	%	50	65	150	-	-	90	30	90	70	90	70	100	70	100	390	Bappeda
		4	3	20	04	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Dana Desa	Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bersumber Dana Desa	%	70	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Bappeda	
4	3	20	05	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Dokumen	-	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	1	25	Bappeda			
4	3	20	06	Penyusunan Master Plan Pengembangan Tambak Air Payau	Tersedianya Dokumen Master Plan Pengembangan Tambak Air Payau	Dokumen	-	-	-	1	75	-	-	-	-	-	-	-	1	75	Bappeda			

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB					
										2017		2018		2019		2020		2021		2022									
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta								
		4	3	20	07	Verifikasi dan Identifikasi (updating) Warga Miskin Berbasis GIS	Tersedianya dokumen Warga Miskin Berbasis GIS	Dokumen	-	-	-	-	-	90	70	100	30	100	30	100	30	100	160	Bappeda					
		4	3	21	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Keberadaan Masterplan Bidang Pengembangan Sosial Budaya	%	Tdk Ada	Tdk Ada	380	Tdk Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	200	100	200	100	200	100	1.380	Bappeda					
						Persentase rekomendasi Kelembagaaan/ Pokja Pembangunan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	%	100	100		100														100	100	100	100	100
						Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Sosial Budaya Daerah	%	100	100		100														100	100	100	100	100
		4	3	21	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Aksi MDGs	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Aksi MDGs	Dokumen	-	1	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	380	Bappeda					
		4	3	21	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan SDGs	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SDGs	Dokumen	-	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda				
		4	3	21	08	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs	Laporan hasil evaluasi pencapaian SDGs	Laporan	-	-	-	-	-	-	1	50	1	50	1	50	3	150	Bappeda						
		4	3	21	09	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	Bappeda					
		4	3	21	10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pembangunan Bidang Sosbud	%	-	-	-	-	-	-	-	90	150	100	150	100	150	100	450	Bappeda					
		4	3	22	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Persentase Keberadaan dokumen Master plan dan Studi Kelayakan Pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	%	35	45	1.617	50	117	55	120	60	120	65	120	70	120	70	2.214	Bappeda						
Keberadaan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Ada/Belum Ada					Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada														

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
										2017		2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
							Persentase Rekomendai Kelembagaaan/ Pokja Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
							Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		4	3	22		Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW)	Tersusunnya dokumen raperda RTRW	Dokumen	-	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400	Bappeda	
		4	3	22	25	Sosialisasi RTRW	Jumlah pelaksanaan sosialisasi RTRW	Kali	-	-	-	-	-	11	40	-	-	-	-	-	-	11	40	Bappeda
		4	3	22	26	Peningkatan Kpasitas Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKRD)	Persentase pelaksanaan koordinasi BKRD	%	-	-	-	-	-	100	40	100	40	100	40	100	40	100	160	Bappeda
		4	3	22		Penyusunan Studi Kelayakan Pelabuhan Laut	Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Laut	Dokumen	-	1	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	600	Bappeda
		4	3	22	21	Penyusunan Master Plan TPI Latawe	Tersusunnya dokumen Master Plan TPI Latawe	Dokumen	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	Bappeda
		4	3	22	16	Penyusunan Master Plant Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Tersusunnya dokumen Master Plant Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Dokumen	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda	
		4	3	22	17	Penyusunan Master Plant Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersusunnya dokumen Master Plant Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dokumen	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	Bappeda
		4	3	22	23	Penyusunan dokumen RDTR lokasi Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)	Tersusunnya dokumen RDTR lokasi Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400	Bappeda
		4	3	22	15	Penyusunan Dokumen RAD AMPL	Tersusunnya Dokumen PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)	Dokumen	-	-	-	1	250	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250	Bappeda
		4	3	22	14	Penyusunan Rencana Induk SPAM Muna Barat	Tersusunnya dokumen Rencana Induk SPAM Muna Barat	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100								100	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB	
										2017		2018		2019		2020		2021		2022					
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
		4	3	22	13	FS Dermaga Apung	studi kelayakan dermaga apung	Dokumen	-	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	Bappeda	
		4	3	22	24	Penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur ke-PU an	Tersusunnya dokumen RPIJM Bidang Infrastruktur ke-PU an	Dokumen	-	1	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	600	Bappeda	
		4	3	22	20	Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tersedianya Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dokumen	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	Bappeda	
		4	3	22	22	Koordinasi dan Pengendalian Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)	Terlaksananya koordinasi dan Pengendalian Program Pamsimas	Laporan	-	90	117	90	117	100	40	100	40	100	40	100	40	100	394	Bappeda	
		4	3	22	27	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Prasaana Wilayah dan SDA	Persentase keikutsertaan dalam rapat-rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Prasaana Wilayah dan SDA	%	-	-	-	-	-	-	100	40	100	40	100	40	100	40	100	120	Bappeda
		4	7	15		Program Pengkajian dan Penelitian.	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pembangunan daerah	%	-	100	-	100	900	100	920	100	940	100	960	100	980	100	4.700	Bappeda	
							Keberadan Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	Ada/Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
		4	7	15	02	Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika Wilayah Kabupaten Muna barat	Tersusunnya dokumen Master Plan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika Wilayah Kabupaten Muna barat	Dokumen	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda
		4	7	15	09	Road Map Pengembangan Usaha Sapi Potong	Tersedianya dokumen pengembangan usaha sapi potong	Dokumen	-	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda
		4	7	15	10	Validasi KLHS Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen KLHS	Dokumen	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda
		4	7	15	11	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3LH)	Tersusunnya dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3LH)	Dokumen	-	-	-	1	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
										2017		2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
		4	7	15	12	Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	Tersedianya data Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	Ada/Tidk Ada	-	-	-	-	1	320	-	-	-	-	-	-	1	320	Bappeda	
		4	7	15	13	Kajian Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Tersedianya data Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Ada/Tidk Ada	-	-	-	-	1	250	-	-	-	-	-	-	1	300	Bappeda	
		4	7	15	14	Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	340	-	-	-	-	1	340	Bappeda		
		4	7	15	15	Kajian Potensi Pembentukan Perusahaan Daerah	Tersedianya dokumen Kajian Potensi Pembentukan Perusahaan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	1	400	Bappeda	
		4	7	15	16	Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan	%	-	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	300	Bappeda		
		4	3	26		Program Pembangunan dan Penelitian Daerah	Persentase Rekomendasi Penelitian yang ditindaklanjuti	%	-	100	350	-	-	-	-	-	-	-	-	100	350	Bappeda		
		4	3	26	04	Penyusunan Pemetaan Komoditi Unggulan pada Sektor Pertanian	Tersusunnya dokumen Pemetaan Komoditi Unggulan pada Sektor Pertanian	Dokumen	-	1	350	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350	Bappeda		
		4	7	16		Program pengkajian dan Pengembangan Wilayah	Persentase Kajian dan Pengembangan Wilayah	%	-	-	-	30,0	-	40	50	300	100	300	100	300	100	70	1.200	Bappeda
							Persentase rekomendasi (Pokja) Pengembangan Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	100												
		4	7	16	16	Survey dan Pemetaan Potensi Perikanan Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Tersusunnya Pemetaan Potensi Perikanan Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Dokumen	-	15	122,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	122,5	Bappeda	
		4	7	16	11	Pemetaan Potensi Kawasan Persawahan Kab. Muna Barat	Tersedianya dokumen Potensi Kawasan Persawahan Kab. Muna Barat	Dokumen	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	Bappeda	
		4	7	16	20	Survei dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya dokumen Potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen	-	-	-	1	70	-	-	-	-	-	-	-	1	70	Bappeda	

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
										2017		2018		2019		2020		2021					2022	
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
		4	3	15	Program Pengembangan data/ Informasi Daerah	Keberadaan Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD)	Ada/Bedlum Ada	Belum Ada	Belum Ada	848	Ada	350	Ada	350	Ada	350	Ada	350	Ada	350	Ada	2.598	Bappeda	
						Keberadaan data Makro Statistik Daerah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada							
						Tersedianya peralatan survey dan pemetaan	Ada/Belum Ada	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada							
						Keberadaan Data berbasis citra satelit	Ada/Belum Ada	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada							
		4	3	15	13	Penyediaan Data dan Informasi Spesial Kewilayaan Berbasis Citra Satelit Pengindraan Jauh Resolusi Tinggi	Tersedianya Data dan Informasi Spesial Kewilayaan Berbasis Citra Satelit Pengindraan Jauh Resolusi Tinggi	Dokumen	1	1	275	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	275	Bappeda
		4	3	15	14	Pengadaan Album Peta RTRW Kabupaten	Tersedianya Album Peta RTRW Kabupaten	Album Peta	-	24	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	100	Bappeda	
		4	3	15	15	Pengadaan Peralatan Survei dan Pemetaan	Tersedianya Peralatan Survei dan Pemetaan	Item	Ada	-	-	-	-	2	50	3	150	-	-	-	-	5	200	Bappeda
		4	3	15	17	Pemutakhiran dan Penyusunan Album Peta RTRW	Tersusunnya Album Peta RTRW yang terkini	Album Peta															Bappeda	
		4	3	15	05	Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya buku Profil Daerah Kabupaten Muna Barat	Buku	0	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	1	50	Bappeda
		4	3	15	06	Pengelolaan Siistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Sisistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Laporan	-	-	-	-	-	1	40	1	40	1	50	1	50	4	180	Bappeda
		4	3	15	09	Penyusunan Aplikasi (Updating) Batabase Pembangunan Berbasis GIS	Tersedianya Aplikasi (Updating) Batabase Pembangunan Berbasis GIS	Aplikasi	-	-	-	1	130	1	60	1	60	1	60	1	40	5	350	Bappeda
		4	3	15	10	Pembangunan dan Pemutakhiran Unsur Peta Dasar Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Tersedianya data Unsur Peta Dasar Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	Bappeda
		4	3	15	18	Pembuatan dan Pengelolaan Web GIS Bappeda	Tersedianya Web GIS Bappeda	Sistem	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1	60	1	60	3	320	Bappeda
		4	3	15	19	Multimedia ATLAS Sumber Daya Alam Kabupaten Muna Barat	Tersedianya Multimedia ATLAS Sumber Daya Alam Kabupaten Muna Barat	Album Peta	-	-	-	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-	1	50	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
										2017		2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
		4	3	15	21	Pemetaan Kawasan Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya dokumen kajian Kawasan Terbuka Hijau (RTH)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	180	-	-	1	180	Bappeda	
		4	3	15	22	Penyusunan Draft RPJMD Tenokratik	Tersedianya dokumen RPJMD Tenokratik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	160	1	160	Bappeda		
		2	14	16		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan Data Statistik yang <i>up to date</i> untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	80	80	470	82,50	-	85,00	-	87,50	-	90,00	-	92,50	-	93	470	Bappeda
		2	14	16		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terusunnya buku statistik daerah	Buku	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	Bappeda	
		2	14	16		Pengolahan, updating dan analisis data spasial Kota Laworo berbasis Citra Satelit	Tersedianya peta-peta wilayah kab. Muna barat berbasis citra satelit yang terkini	Dokumen	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	Bappeda	
		2	14	16		Penyusunan dan Pengumpulan Data Kemiskinan, IPM dan IKK *)	Tersusunnya data kemiskinan daerah, IPM, dan IKK	Dokumen	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	Bappeda	
		2	14	16		Pemetaan Infrastruktur wilayah Berbasis Citra Satelit	Terpetakannya infrastruktur wilayah berbasis citra satelit	Dokumen	-	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	Bappeda	
		2	14	16		Pengadaan Buku Statistik Daerah	Tersedianya Buku Statistik Daerah	Buah	80	80	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	109	Bappeda	
		2	14	16		Penyusunan Aplikasi Database Pembangunan Berbasis GIS	Tersedianya aplikasi database pembangunan berbasis GIS	Aplikasi	-	1	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51	Bappeda	

BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada table 7.1.

Tabel 7.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	2	3	3	4	4	4
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Meningkatkan tingkat kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%	100%

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat			Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Tidak Baik/ Kurang Baik/ Baik/ Sangat Baik
	Meningkatkan tingkat kepuasan Pelayanan Publik		Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Tidak Baik/ Kurang Baik/ Baik/ Sangat Baik
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	%

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan
		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan air	Liter
			Kebutuhan listrik	Kwh
			Kebutuhan komunikasi	Unlimited
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Unit
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah anggota tim pengelola jasa keuangan	Orang
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	%
		Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan jenis alat tulis kantor	%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak, foto copy, dan jilid	%
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat listrik	%
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Item
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis surat kabar/majalah yang tersedia	Buah
		Penyediaan makanan dan minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman rapat	%
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase penyelesaian rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah	%
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga honorer/Pegawai Tidak Tetap	Orang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keberadaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%
		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan	Unit
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Item
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	Item
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dirawat	Unit
		Pemeliharaan/Penataan Lingkungan Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan/ penataan lingkungan gedung kantor	%
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase penggunaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	%
			Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	%
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas ASN	%
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase pemenuhan pakaian seragam olah raga dan pakaian tenunan daerah ASN	%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	%
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang
		Pendidikan dan pelatihan Non formal	Jumlah ASN dan PTT yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang
Meningkatkan pembangunan infrastruktur			Capaian akses daerah-daerah potensial dan pusat-pusat pengembangan wilayah yang terkoneksi	%

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan
Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh		Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	Kawasan
		Peogram Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Keberadaan Master Plan tematik pengembangan Wilayah Strategis	%
		Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Dokumen
		Penyusunan Master Plan Penataan Kampung Nelayan	Tersedianya Master Plan Penataan Kampung Nelayan	Dokumen
		Penyusunan DED dan FS Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional	Tersedianya dokumen DED dan FS Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional	Dokumen
		Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Benteng Tiworo	Tersedianya dokuemn Master Plan Kawasan Strategis Benteng Tiworo	Dokumen
		Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Pesisir dan pulau-Pulau Keci;	Tersedianya dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Pesisir dan pulau-Pulau Keci;	Dokumen
		Penyusunan Database Kawasan Kumuh Kabupaten Muna Barat	Tersedianya dokuemn Database Kawasan Kumuh Kabupaten Muna Barat	Dokumen
		Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar	Persentase Master Plan tematik pengembangan Wilayah Strategis	%
		Penyusunan Master Plan Pembangunan Prasarana Terminal	Tersedianya dokumen Master Plan Pembangunan Prasarana Terminal	Dokumen
		Penyusunan Master Plan Persampahan	Tersedianya dokumen Master Plan Persampahan	Dokumen
		Pemutakhiran Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Program Nasional PPSP Tahun 2017	Tersedianya dokuemn Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Program Nasional PPSP Tahun 2017	Dokumen
		Reviu Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota	Tersedianya dokuen hasil Reviu Dokumen Strategi Sanitasi Kota	Dokumen
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Persentase Aparatur yang bebas dari kasus korupsi	%
			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu	%
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kelembagaan/ Pokja perencanaan pembangunan daerah yang diberdayakan	%
		Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah keikutsertaan aparat perencanaan dalam peningkatan kompetensi teknis	kegiatan/tahun
		Pembentukan pokja Pelaporan Dana Alokasi Khusus	Jenis Laporan yang dibuat	Laporan
		Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)	Tersedianya website	Website
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keberadaan Perkada RKPD, MoU KUA/PPAS dan perubahannya	Ada/Tidak Ada
			Keberadaan Loporan pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Pembangunan	Ada/Tidak Ada
			Keberadaan perda RPJPD Kab. Muna Barat	Ada/Belum Ada
			Keberadaan Perda RPJMD kab. Muna Barat	Ada/Belum Ada
		Penyususnan Rancangan Awal RKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD	Dokumen

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penetapan RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD dan Penetapan RKPD dengan Perbup	Dokumen
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan
		Penyusunan Dokuemn Perubahan KUA dan PPA	Tersedianya Dokuemn Perubahan KUA dan PPA	Dokumen
		Penyusunan Dokumen KUA dan PPA	Tersedianya Dokumen KUA dan PPA	Dokumen
		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang	Kecamatan
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan
		Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja OPD dan Rapat Evaluasi Provinsi	Persentase keikutsertaan OPD dalam rapat evaluasi	%
		Penyusunan RKPD Perubahan	Tersedianya dokumen RKPD Perubahan yang ditetapkan dengan Perbup	Dokumen
		Penyusunan Dokuemn RPJMD dan Penetapan RPJMD	Tersedianya Dokuemn RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Dokumen
		Penyusunan Dokuemen RPJPD dan Penetapan RPJPD	Tersedianya Dokuemen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Dokumen
		Penyusunan LKPJ Bupati Muna Barat	Tersedianya dokumen LKPJ Bupati Muna Barat	Dokumen
		Revisi RPJMD	Tersedianya dokumen Revisi RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Keberadaan Masterplan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah	%
			Persentase rekomendasi Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Ekonomi Daerah yang ditindaklanjuti	%
			Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Ekonomi Daerah	%
		Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan	Tersedianya dokumen Master Plan Kawasan Agropolitan	Dokumen
		Penyusunan dan Analisis Data Potensi Sentra Peternakan Rakyat	Tersedianya Dokumen Data Potensi Sentra Peternakan Rakyat	Dokumen
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Koordnasi Movev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD	%
		Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Dana Desa	Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bersumber Dana Desa	%
		Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Dokumen
		Penyusunan Master Plan Pengembangan Tambak Air Payau	Tersedianya Dokumen Master Plan Pengembangan Tambak Air Payau	Dokumen
		Verifikasi dan Identifikasi (updating) Warga Miskin Berbasis GIS	Tersedianya dokumen Warga Miskin Berbasis GIS	Dokumen
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Keberadaan Masterplan Bidang Pengembangan Sosial Budaya	%
			Persentase rekomendasi Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	%

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan
			Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Sosial Budaya Daerah	%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Aksi MDGs	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Aksi MDGs	Dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SDGs	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SDGs	Dokumen
		Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs	Laporan hasil evaluasi pencapaian SDGs	Laporan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pembangunan Bidang Sosbud	%
		Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Persentase Keberadaan dokumen Master plan dan Studi Kelayakan Pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	%
			Keberadaan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Ada/Belum Ada
			Persentase Rekomendai Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA yang ditindaklanjuti	%
			Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	%
		Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW)	Tersusunnya dokumen raperda RTRW	Dokumen
		Sosialisasi RTRW	Jumlah pelaksanaan sosialisasi RTRW	Kali
		Peningkatan Kpasitas Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKRD)	Persentase pelaksanaan koordinasi BKRD	%
		Penyusunan Studi Kelayakan Pelabuhan Laut	Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Laut	Dokumen
		Penyusunan Master Plan TPI Latawe	Tersusunnya dokumen Master Plan TPI Latawe	Dokumen
		Penyusunan Master Plant Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Tersusunnya dokumen Master Plant Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Dokumen
		Penyusunan Master Plant Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersusunnya dokumen Master Plant Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dokumen
		Penyusunan dokumen RDTR lokasi Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)	Tersusunnya dokumen RDTR lokasi Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)	Dokumen
		Penyusunan Dokumen RAD AMPL	Tersusunnya Dokumen PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)	Dokumen
		Penyusunan Rencana Induk SPAM Muna Barat	Tersusunnya dokumen Rencana Induk SPAM Muna Barat	Dokumen
		FS Dermaga Apung	Tersusunnya dokumen studi kelayakan dermaga apung	Dokumen
		Penyusunan RPIUM Bidang Infrastruktur ke-PU an	Tersusunnya dokumen RPIUM Bidang Infrastruktur ke-PU an	Dokumen
		Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tersedianya Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dokumen
		Koordinasi dan Pengendalian Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)	Terlaksananya koordinasi dan Pengendalian Program Pamsimas	Laporan

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan
		Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Prasaana Wilayah dan SDA	Persentase keikutsertaan dalam rapat-rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Prasaana Wilayah dan SDA	%
		Program Pengkajian dan Penelitian.	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pembangunan daerah	%
			Keberadaan Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	Ada/Belum Ada
		Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika Wilayah Kabupaten Muna barat	Tersusunnya dokumen Master Plan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika Wilayah Kabupaten Muna barat	Dokumen
		Road Map Pengembangan Usaha Sapi Potong	Tersedianya dokumen pengembangan usaha sapi potong	Dokumen
		Validasi KLHS Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen KLHS	Dokumen
		Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3LH)	Tersusunnya dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3LH)	Dokumen
		Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	Tersedianya data Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	Ada/Tidk Ada
		Kajian Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Tersedianya data Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Ada/Tidk Ada
		Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Dokumen
		Kajian Potensi Pembentukan Perusahaan Daerah	Tersedianya dokumen Kajian Potensi Pembentukan Perusahaan Daerah	Dokumen
		Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan	%
		Program Pembangunan dan Penelitian Daerah	Persentase Rekomendasi Penelitian yang ditindaklanjuti	%
		Penyusunan Pemetaan Komoditi Unggulan pada Sektor Pertanian	Tersusunnya dokumen Pemetaan Komoditi Unggulan pada Sektor Pertanian	Dokumen
		Program pengkajian dan Pengembangan Wilayah	Persentase Kajian dan Pengembangan Wilayah	%
			Persentase rekomendasi (Pokja) Pengembangan Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	%
		Survey dan Pemetaan Potensi Perikanan Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Tersusunnya Pemetaan Potensi Perikanan Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Dokumen
		Pemetaan Potensi Kawasan Persawahan Kab. Muna Barat	Tersedianya dokumen Potensi Kawasan Persawahan Kab. Muna Barat	Dokumen
		Survei dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya dokumen Potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen
		Program Pengembangan data/ Informasi Daerah	Keberadaan Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD)	Ada/Bedlum Ada
			Keberadaan data Makro Statistik Daerah	Ada/Tidak Ada
			Tersedianya peralatan survey dan pemetaan	Ada/Belum Ada
			Keberadaan Data berbasis citra satelit	Ada/Belum Ada
		Penyediaan Data dan Informasi Spesial Kewilayaan Berbasis Citra Satelit Pengindraan Jauh Resolusi Tinggi	Tersedianya Data dan Informasi Spesial Kewilayaan Berbasis Citra Satelit Pengindraan Jauh Resolusi Tinggi	Dokumen

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan
		Pengadaan Album Peta RTRW Kabupaten	Tersedianya Album Peta RTRW Kabupaten	Album Peta
		Pengadaan Peralatan Survei dan Pemetaan	Tersedianya Peralatan Survei dan Pemetaan	Item
		Pemutakhiran dan Penyusunan Album Peta RTRW	Tersusunnya Album Peta RTRW yang terkini	Album Peta
		Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya buku Profil Daerah Kabupaten Muna Barat	Buku
		Pengelolaan Sisistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Sisistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Sistim
		Penyusunan Aplikasi (Updating) Batabase Pembangunan Berbasis GIS	Tersedianya Aplikasi (Updating) Batabase Pembangunan Berbasis GIS	Aplikasi
		Pembangunan dan Pemutakhiran Unsur Peta Dasar Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Tersedianya data Unsur Peta Dasar Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Dokumen
		Pemetaan Potensi Kawasan Persawahan Kab. Muna Barat	Tersedianya dokumen Potensi Kawasan Persawahan Kab. Muna Barat	Dokumen
		Pembuatan dan Pengelolaan Web GIS Bappeda	Tersedianya Web GIS Bappeda	Sistem
		Multimedia ATLAS Sumber Daya Alam Kabupaten Muna Barat	Tersedianya Multimedia ATLAS Sumber Daya Alam Kabupaten Muna Barat	Album Peta
		Pemetaan Kawasan Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya dokumen kajian Kawasan Terbuka Hijau (RTH)	Dokumen
		Penyusunan Draft RPJMD Tenokratik	Tersedianya dokumen RPJMD Tenokratik	Dokumen
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan Data Statistik yang <i>up to date</i> untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%
		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terusunnya buku statistik daerah	Buku
		Pengolahan, updating dan analisis data spasial Kota Laworo berbasis Citra Satelit	Tersedianya peta-peta wilayah kab. Muna barat berbasis citra satelit yang terkini	Dokumen
		Penyusunan dan Pengumpulan Data Kemiskinan, IPM dan IKK *)	Tersusunnya data kemiskinan daerah, IPM, dan IKK	Dokumen
		Pemetaan Infrastruktur wilayah Berbasis Citra Satelit	Terpetakannya infrastruktur wilayah berbasis citra satelit	Dokumen
		Pengadaan Buku Statistik Daerah	Tersedianya Buku Statistik Daerah	Buah
		Penyusunan Aplikasi Database Pembangunan Berbasis GIS	Tersedianya aplikasi database pembangunan berbasis GIS	Aplikasi

BAB VIII PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Muna Barat periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Muna Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kabupaten Muna Barat termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kabupaten Muna Barat.

Renstra Bappeda Kabupaten Muna Barat periode 2017-2022 harus dijadikan acuan kerja bagi unit- unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Muna Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.